

Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Program Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu

Windawati¹, Moh. Taufik Hidayat²

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: moh.taufik.hidayat@ugj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Sembako Program by the Cirebon Regency Social Service in improving the welfare of the underprivileged community. The focus of the study is directed at five indicators of effectiveness based on Campbell J.P.'s theory (1970), namely program success, target success, satisfaction with the program, input-output levels, and achievement of overall goals. This study uses a qualitative descriptive approach through Research and Work Practice (RISTIK) activities. Data collection techniques are carried out through observation, document studies, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the Sembako Program still faces several problems, such as inaccurate recipient targets, inaccurate poverty data, low understanding of beneficiary, limited implementing resources, and minimal long-term impact evaluation. To improve the effectiveness of the program, improvement strategies are needed including data updates, strengthening the capacity of implementers, digitizing the system and increasing social literacy.*

Keywords: *Program Effectiveness, Basic Food Aid, Community Welfare*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Bantuan Program Sembako oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Fokus kajian diarahkan pada lima indikator efektivitas berdasarkan teori Campbell J.P. (1970), yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkatan input-output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif melalui kegiatan Riset dan Praktik (RISTIK) yang dilaksanakan di Dinas Sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Program Sembako masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, ketidakakuratan data kemiskinan, rendahnya tingkat pemahaman penerima manfaat, keterbatasan sumber daya pelaksana program dan minimnya pengukuran dampak jangka panjang. Untuk meningkatkan efektivitas program, dibutuhkan strategi perbaikan mencakup pembaruan data, penguatan kapasitas pelaksana, digitalisasi sistem, peningkatan literasi sosial.

Kata kunci: *Efektivitas Program, Bantuan Sembako, Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, upaya pengentasan kemiskinan terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah meluncurkan beragam program perlindungan sosial, termasuk Bantuan Program Sembako yang merupakan kelanjutan dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meringankan beban pengeluaran, serta memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang mampu. Di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Sembako. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari perangkat daerah bertanggung jawab atas pengelolaan data penerima, koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, serta memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan sistem yang kuat dalam aspek administrasi, verifikasi data, pendampingan, hingga evaluasi dampak bantuan terhadap penerima manfaat (Candra Pratama, 2024).

Namun dalam implementasinya, pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, ketidakakuratan data kemiskinan, rendahnya tingkat pemahaman penerima manfaat, keterbatasan sumber daya pelaksana program, serta minimnya evaluasi dampak jangka panjang. Permasalahan ini dapat menghambat tercapainya tujuan program dan mengurangi efektivitas pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Bantuan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Bantuan Program Sembako di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses, tantangan, serta dinamika implementasi program berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Data dikumpulkan melalui kegiatan Riset dan Praktik Kerja (RISTIK) yang dilaksanakan mulai dari 08 April hingga 10 Juni 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, studi dokumen, serta wawancara. Teknik pengumpulan data digabungkan sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus utama pada makna yang terkandung dalam temuan penelitian (Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas Campbell J.P. (1970), yang mencakup lima indikator :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran

3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkatan input-output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Masalah

Berdasarkan hasil Riset dan Praktik di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ditemukan sejumlah permasalahan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Bantuan Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kurang mampu. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Ketidaktepatan Sasaran Penerima Manfaat

Salah satu indikator utama efektivitas pelaksanaan Program Sembako adalah ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran ini menjadi sangat penting karena menentukan sejauh mana program dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan menekan angka kemiskinan. Dalam konteks pelaksanaan Program Sembako di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, aspek ini masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan sistematis. Program Sembako pada prinsipnya ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebuah basis data yang dikelola Kementerian Sosial dan diperbarui secara periodik oleh pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak ditemukan kasus di mana bantuan sosial diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak layak menerima (*inclusion error*), sementara sejumlah warga yang seharusnya layak menerima justru tidak terdaftar dan tidak memperoleh bantuan (*exclusion error*). Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam proses pemutakhiran dan validasi data DTKS di tingkat lokal (Puspitasari & Resmalasari, 2021).

Faktor utama penyebab ketidaktepatan sasaran tersebut adalah belum optimalnya partisipasi aktif dari pemerintah desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data. Ketika proses pendataan hanya dilakukan secara administratif tanpa keterlibatan penuh dari orang lokal, maka potensi kesalahan data akan semakin besar. Selain itu, proses pembaruan DTKS seringkali tidak dilakukan secara berkala atau sistematis, sehingga data yang digunakan bisa jadi sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Masalah lainnya adalah minimnya akses dan transparansi masyarakat terhadap status kepesertaan dalam program. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah mereka terdaftar dalam DTKS atau tidak, dan bagaimana mekanisme pengajuan atau keberatan jika terjadi kesalahan data. Hal ini menunjukkan perlunya sistem digital yang lebih transparan di mana masyarakat dapat mengecek statusnya, mengajukan permohonan, atau menyampaikan koreksi data dengan mudah.

2. Ketidakakuratan Data Kemiskinan

Data kemiskinan memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial, termasuk Bantuan Program Sembako yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Kualitas dan akurasi data menjadi hal utama dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan bagaimana kebutuhan mereka dapat diintervensi secara tepat. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, program sosial berisiko mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Atieq & Alam, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, hasil riset dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa validitas dan keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menjadi tantangan signifikan. Banyak kasus ditemukan di mana data penerima manfaat tidak mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Sebagian warga yang sudah meninggal, pindah domisili, atau telah mengalami perubahan status sosial ekonomi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan atau bencana sosial justru tidak terdaftar dalam DTKS. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti ; proses pembaruan data belum dilakukan secara berkala, masih banyak warga yang enggan melaporkan perubahan status ekonomi atau kondisi rumah tangga karena kurang paham bahwa data tersebut menjadi dasar pemberian bantuan. Dampak dari ketidakakuratan data ini sangat nyata dalam pelaksanaan Program Sembako. Ketika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, bantuan menjadi tidak tepat sasaran, menimbulkan kecemburuan sosial, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu, kesalahan data menyebabkan pemborosan anggaran karena bantuan sosial bisa jatuh kepada individu atau keluarga yang tidak membutuhkan.

Dengan membenahi kualitas dan akurasi data kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon akan memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan Program Sembako secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Data yang valid adalah fondasi dari kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan (Marlina dkk., 2024).

3. Rendahnya Tingkat Pemahaman Penerima Manfaat

Efektivitas Program Sembako tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran dan akurasi data, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana penerima manfaat memahami tujuan, mekanisme, serta hak dan kewajiban mereka dalam program tersebut. Pemahaman yang baik akan mendorong pemanfaatan bantuan secara optimal dan mencegah penyalahgunaan.

Namun, berdasarkan hasil riset dan praktik yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ditemukan bahwa pemahaman sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Sembako masih tergolong rendah. Banyak KPM hanya mengetahui bahwa mereka menerima bantuan berupa sembako atau saldo elektronik, tanpa memahami secara menyeluruh latar belakang program, tujuan

jangka panjangnya, serta hak dan kewajiban yang melekat pada status mereka sebagai penerima. Beberapa bahkan tidak mengetahui bahwa bantuan tersebut berasal dari anggaran pemerintah pusat atau daerah, dan tidak memahami mekanisme pengaduan apabila terjadi kesalahan data atau keterlambatan penyaluran (Putri dkk., 2021).

Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program. Misalnya, terdapat kasus di mana bantuan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga malah dialihkan untuk keperluan lain yang tidak mendesak. Di sisi lain, rendahnya kesadaran terhadap prosedur administrasi menyebabkan sebagian KPM tidak melaporkan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga mereka, seperti jika mereka sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Akibatnya, validitas data terganggu.

Keterbatasan sumber daya pelaksana program seperti Puskesmas dan Kader Kesejahteraan Sosial (KKS) turut mempengaruhi rendahnya sosialisasi kepada penerima manfaat. Petugas lapangan kerap kali hanya berfokus pada kegiatan administratif seperti distribusi dan pelaporan bantuan, tanpa memiliki waktu dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pembinaan atau pendampingan sosial secara aktif. Dari sisi partisipasi, sebagian besar penerima manfaat cenderung pasif. Mereka hanya menunggu bantuan datang tanpa terlibat dalam proses evaluasi, pemberian umpan balik, atau pengawasan pelaksanaan program.

4. Keterbatasan Sumber Daya Pelaksana Program

Sumber daya pelaksana program dalam jumlah personel pelaksana di tingkat desa atau kelurahan masih sangat terbatas. Petugas Puskesmas, pendamping sosial, dan operator data desa sering kali merangkap banyak fungsi dalam waktu yang bersamaan, sehingga pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program masih belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses operasional program masih sangat terbatas. Meskipun pemerintah pusat telah mengembangkan berbagai aplikasi seperti SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation), belum semua daerah mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan infrastruktur dan keterampilan digital Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat lokal. Padahal, penggunaan teknologi digital sangat penting untuk mempercepat proses pendataan, validasi, distribusi, serta pelaporan bantuan.

5. Minimnya Pengukuran Dampak Jangka Panjang

Evaluasi terhadap Program Sembako tidak hanya berhenti pada pengukuran penyaluran bantuan secara administratif, tetapi harus melibatkan analisis menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh program tersebut. Evaluasi yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk melihat apakah program benar-benar membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) serta bagaimana menjamin keberlanjutan dampak positif program dalam jangka panjang.

Evaluasi dampak masih menjadi kelemahan mendasar dalam pelaksanaan Program Sembako. Selama ini, ukuran keberhasilan lebih banyak didasarkan pada data administratif, seperti jumlah bantuan yang tersalurkan atau jumlah KPM yang tercatat dalam DTKS. Namun, belum terdapat sistem evaluasi yang mampu menilai perubahan nyata pada kualitas hidup penerima manfaat. Dampak sosial seperti peningkatan ketahanan pangan, perbaikan pola konsumsi keluarga, atau peningkatan akses terhadap kesehatan belum diukur secara konsisten.

Monitoring terhadap dampak program selama ini masih dilakukan secara terbatas dan bersifat jangka pendek. Pelaporan program oleh petugas lapangan umumnya hanya menyampaikan data distribusi dan laporan realisasi anggaran. Monitoring tidak dilakukan secara berkala terhadap kondisi sosial ekonomi KPM setelah menerima bantuan. Idealnya, evaluasi jangka panjang dilakukan setiap 6 atau 12 bulan sekali untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas bantuan.

Dengan memperkuat sistem evaluasi dan strategi keberlanjutan, Bantuan Program Sembako tidak hanya menjadi solusi sementara atas kemiskinan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial jangka panjang yang lebih mandiri dan berdaya.

Penawaran Solusi

Pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Berikut adalah sejumlah Solusi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat kurang mampu :

1. Solusi untuk Mengatasi Ketidaktepatan Sasaran Penerima Manfaat

Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala setiap enam bulan sekali, dengan pelibatan aktif perangkat desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat agar proses validasi lebih partisipatif dan sesuai dengan realita sosial.
- 2) Pengembangan sistem digital berbasis aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek status kepesertaan dan mengajukan keberatan jika mereka merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar.

2. Solusi Untuk Mengatasi Ketidakakuratan Data Kemiskinan

Data yang akurat merupakan syarat utama untuk mengetahui efektivitas bantuan sosial. Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Integrasi sistem data antar instansi (Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik) untuk mencegah tumpang tindih data serta memproses validasi penerima manfaat.

- 2) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa dalam input data melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar pengelolaan DTKS menjadi lebih profesional dan minim kesalahan.

3. Solusi untuk Mengatasi Rendahnya Pemahaman Penerima Manfaat

Pemahaman dan keterlibatan penerima manfaat sangat menentukan keberhasilan program. Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Peningkatan kegiatan sosialisasi dan literasi sosial melalui Puskesmas dan Kader Kesejahteraan Sosial (KKS) di desa, dengan pendekatan langsung ke rumah-rumah (*door to door*) dan melalui media lokal.
- 2) Pembuatan buku peoman atau video edukatif sederhana tentang hak dan kewajiban KPM, serta mekanisme penggunaan bantuan secara benar.

4. Solusi untuk Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Pelaksana Program

Efektivitas program ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme para pelaksana. Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Pengadaan pelatihan rutin dan insentif berbasis kinerja bagi petugas lapangan, termasuk Puskesmas dan Pendamping Sosial.
- 2) Digitalisasi proses distribusi bantuan dari pendataan, verifikasi hingga pelaporan dengan integrasi Sistem Informasi Pelayanan Sosial (SIMPEL) atau sistem serupa.

5. Solusi untuk Mengatasi Minimnya Pengukuran Dampak Jangka Panjang

Tanpa pengukuran dampak, efektivitas program sulit untuk diukur. Oleh karena itu :

- 1) Pelaksanaan evaluasi berkala berbasis indikator kesejahteraan seperti pengeluaran rumah tangga, ketahanan pangan dan akses layanan dasar. Evaluasi ini dapat dilakukan setiap 6–12 bulan, untuk melihat apakah KPM mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi setelah menerima bantuan.
- 2) Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk melakukan uji efektivitas terhadap KPM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.

Melalui penerapan solusi di atas, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sembako secara teknis dan administratif, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Program bantuan tidak boleh berhenti pada distribusi material, tetapi harus menjadi jembatan menuju peningkatan kapasitas, partisipasi aktif masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan yang inklusif.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Bantuan Program Sembako oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Namun, hasil riset dan praktik menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Berdasarkan pendekatan teori efektivitas Campbell J.P. (1970), terdapat lima aspek utama yang

menjadi sorotan: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkatan input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Pertama, ketepatan sasaran masih menjadi masalah utama, ditandai dengan ketidaktepatan penerima manfaat akibat tidak akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua, ketidakakuratan data kemiskinan mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Ketiga, pemahaman penerima manfaat terhadap program masih rendah, sehingga berpengaruh pada pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai tujuan. Keempat, pemanfaatan sumber daya belum optimal, karena kurangnya kapasitas baik dari jumlah personel maupun sarana pendukung. Kelima, minimnya sistem monitoring jangka panjang terhadap kesejahteraan penerima manfaat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bantuan program sembako oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, efektivitas distribusi, partisipasi masyarakat serta sistem evaluasi dampak. Dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, melakukan pembaruan data secara berkala, meningkatkan kapasitas pelaksana serta menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis data program ini berpotensi lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atieq, M. Q., & Alam, W. N. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon: Analysis Of Accounting Information System Zakat, Infaq And Sedah At Baznas Cirebon District. *Jurnal Actual Organization Of Economic (JAGOE)*, 3(01), Article 01.
- Candra Pratama. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Perspektif Fiqh Siyasah)* [Diploma, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ]. <http://web.syekhnurjati.ac.id>
- Marlina, T., Rahman, H. P., Milyanti, M., Fitriani, A. A., Rahadatul 'Aisy, R., Shonia, A. N., Nisa, Q., Tantowijaya, B., & Yasir, N. M. (2024). Penguatan Legalitas Pelaku UMKM melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.54082/jpmii.375>
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). Manajemen birokrasi dan kebijakan : penelusuran konsep dan teori. In TA - TT - (Cetakan pe). Pustaka Pelajar. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/902802082>
- Puspitasari, R., & Resmalasari, S. (2021). Kajian Konflik Sosial Terhadap Kebijakan Social Safety Net Pada Era New Normal Di Kabupaten Cirebon. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/pakis.v1i2.4009>
- Putri, D. S. A., Basalamah, M. R., & Dianawati, E. (2021). Implementasi Kebijakan

Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 10(16), Article 16.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta*, CV (Issue April).